

**PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT NELAYAN PUGER
KABUPATEN JEMBER 2001-2012**

Aryni Ayu, Sugiyanto, Sumarjono
Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail:@ymail.com

ABSTRAK

Kebijakan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan adalah substansi penting penentu peningkatan sektor perekonomian dan sosial masyarakat nelayan. Kebijakan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hasil-hasil kelautan dan perikanan, karena sifat lautan yang *open access* (dapat diakses khalayak umum) dan *res nullius* (hasil laut menjadi milik perseorangan sampai ditangkap) yang dapat menyebabkan keadaan laut menjadi *overcapacity* (daya tangkap lebih) dan merusak ekosistem didalamnya. Keadaan daya tangkap lebih dapat berakibat pada berkurangnya hasil tangkapan ikan masyarakat nelayan. Selain itu, pola hidup masyarakat pesisir yang masih tergantung pada pengambe', dan tingkat pendidikan yang rendah, kurang mendukung kemajuan sosial ekonomi nelayan. Hal tersebut masih terjadi di komunitas pesisir Puger, Kabupaten Jember hingga kini, sehingga sepanjang tahun 2001-2012 pemerintah menerapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir mencakup pengembangan nelayan dan masyarakat pesisir lainnya di bidang peningkatan keahlian, konservasi lingkungan, dan perluasan usaha kemaritiman. Regulasi tersebut dapat berimplikasi luas terhadap sosial ekonomi masyarakat nelayan

Kata kunci: *kebijakan, nelayan, social economi*

ABSTRACT

Government policy in the field of marine and fisheries are important determinants of substance increase the economic and social sectors of the fishing community. Policies are needed to improve the quality of the results of marine and fisheries, due to the nature of the oceans that open access (accessible to the general public) and *res nullius* (marine products belong to the individuals captured) which may cause the sea state becomes *overcapacity* (more capture power) and damage the ecosystem therein. State power can result in catching more fish catches reduced fishing communities. In addition, coastal lifestyle of the people who still depend on pengambe ', and low education levels, lack of support fisherman socioeconomic progress. It is still the case in coastal communities Puger, Jember until now, so throughout the year 2001-2012 the government implemented a policy of empowerment include the development of coastal fishing communities and other coastal communities in the areas of skill improvement, environmental conservation, and maritime expansion. The regulation may have implications for the wider socioeconomic fishing communities .

Key word: *policy, fisherman, social economic*

PENDAHULUAN

Ranah kelautan dan perikanan dapat menjadi *mainstream* bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara. Sudah waktunya bagi kemaritiman Indonesia yang sudah sejak berabad-abad lalu menjadi tumpuan mata pencaharian masyarakat, mendapat perhatian besar dari banyak pihak. Tentu saja jika didukung oleh regulasi yang berpihak pada nelayan. Sebab, perhatian besar terhadap sektor ini dapat mempersempit rentan kemiskinan nelayan. Pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun internasional dan dimungkinkan menjadi investasi negara di masa depan dengan peningkatan sosial ekonomi nelayan.

Keberadaan nelayan dalam negeri yang pada umumnya berada dibawah garis kemiskinan, dengan penghasilan 2U\$ per hari dapat memperlambat tumbuhnya tingkat sosial ekonomi masyarakat pesisir dalam hal tingkat pendapatan nelayan sehari-hari. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah, ketergantungan pada pemodal informal, dan kurangnya kepercayaan masyarakat pesisir terhadap program-program kelautan yang dijalankan oleh pemerintah akibat ketidak merataan bantuan yang diterima nelayan. Kebijakan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan harus berfokus pada kesejahteraan masyarakat nelayan, dengan memberdayakan segala potensi yang ada di ranah pesisir di berbagai daerah karena kebijakan kelautan dinilai penting untuk meningkatkan kualitas hasil-hasil kelautan.

Di pesisir pantai Puger Kabupaten Jember, potensi perikanan laut yang ada mencapai 14.691,5 ton terdiri dari jenis ikan pelagis dan demersal, seperti: tongkol, cumi-cumi, tuna, cakalang, tengiri, cucut, udang, dan sebagainya (Puger dalam Angka, 2011: 78-79), namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Secara fisik, hal ini terlihat dari bentuk pemukiman masyarakat setempat, umumnya terdiri dari rumah-rumah kumuh, sanitasi rendah, berbau amis, dan berdempet-dempet di sekitar pemukiman nelayan Puger yang menandakan kehidupan sosial ekonomi nelayan belum membaik dan rentan terhadap kemiskinan.

Penetapan kebijakan sebelumnya di era Orde Baru yakni modernisasi perikanan berdampak pada penggunaan alat-alat canggih untuk kegiatan melaut. Pengaruhnya pada kehidupan sosial masyarakat nelayan adalah terbaginya struktur sosial nelayan Puger berdasarkan alat tangkap ikan yang dipergunakan. Di bidang ekonomi, hasil tangkapan nelayan meningkat di tahun 1998, diiringi dengan kredit macet alat tangkap ikan yang diberikan oleh pemerintah. Secara keseluruhan, regulasi tersebut belum dapat menjawab permasalahan yang ada di kelautan. Dari realitas inilah pemerintah mulai melakukan pembenahan terkait pembangunan ranah kelautan dan perikanan. Sepanjang tahun 2001-2012, pemerintah menerapkan dan mengembangkan kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kualitas sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di bidang kelautan dan perikanan.

Maksud yang terkandung dalam judul “Pengaruh Kebijakan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Puger Kabupaten Jember”, ialah suatu pengaruh yang disebabkan oleh perkembangan kebijakan bidang kelautan dan perikanan mencakup asas, rencana, dan tindakan untuk meningkatkan keahlian, hasil tangkapan, dan pengembangan usaha masyarakat pesisir terhadap kondisi sosial ekonomi yang difokuskan pada : (1) strukturisasi nelayan, (2) pranata sosial, (3) pendapatan nelayan di Pesisir Pantai Puger Kabupaten Jember.

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi ruang lingkup temporal atau waktu yang peneliti ambil dalam kegiatan penelitian agar topik permasalahan yang dibahas tidak terlalu luas. Ruang lingkup temporal dalam penelitian ini yaitu mulai tahun 2001 sampai tahun 2012. Karena pada tahun 2001 merupakan awal terlihatnya perubahan kebijakan yang lebih difokuskan pada pemberdayaan nelayan. Tahun 2012 dijadikan sebagai batas akhir penelitian ini, untuk membuktikan perkembangan implementasi kebijakan dan pengaruhnya pada sosial ekonomi masyarakat nelayan. Lingkup spasial dalam penelitian ini yakni Desa Puger Kulon dan Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu daerah yang juga menjadi wilayah penerapan kebijakan kelautan dan perikanan. Sedangkan lingkup tematikan dalam penelitian ini yaitu mengenai bentuk perkembangan kebijakan kelautan dan perikanan, dan dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi nelayan.

Permasalahan yang akan menjadi pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan Puger sebelum tahun 2001?
2. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah bidang kelautan dan perikanan di Pesisir Pantai Puger dalam rentang waktu tahun 2001-2012?
3. Bagaimana pengaruh implementasi kebijakan tersebut terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan Puger dalam rentang waktu tahun 2001-2012?

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meneliti kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan Puger sebelum tahun 2001.
2. Menganalisis implementasi kebijakan pemerintah bidang kelautan dan perikanan di Pesisir Pantai Puger dalam rentang waktu tahun 2001-2012.
3. Menganalisis pengaruh implementasi kebijakan pemerintah bidang kelautan dan perikanan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan Puger dalam rentang waktu tahun 2001-2012.

Penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat diantaranya:

1. Bagi penulis, merupakan media latihan berpikir kritis dan logis dalam rangka mengembangkan karir dan profesionalisme sebagai calon guru sejarah.

2. Bagi almamater, merupakan perwujudan dari salah satu tridarma perguruan tinggi, khususnya dharma penelitian pengembangan ilmu.

3. Bagi mahasiswa dan peneliti pemula, untuk menambah pengetahuan sejarah serta dijadikan dasar pandangan teori dan bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian sejenis yang berkaitan dengan pengaruh kebijakan pemerintah bidang kebijakan kelautan dan perikanan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan Puger Kabupaten Jember Tahun 2001-2012.

4. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, merupakan sumbangan perbendaharaan kepustakaan tentang pengaruh kebijakan pemerintah bidang kebijakan kelautan dan perikanan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan Puger Kabupaten Jember Tahun 2001-2012.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi ekonomi yang digunakan untuk mengkaji gejala sosial yang terjadi di masyarakat berdasarkan perspektif sosiologi dan ekonomi. Untuk mempertajam hasil analisis dari penggunaan pendekatan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menggunakan teori fungsional yang dapat mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut Heni Puspitawati (2009), kehidupan masyarakat digambarkan sebagai strukturasi organisme, dimana masyarakat adalah tubuh, sedangkan individu-individu lainnya adalah organ. Jika salah satu organ mengalami 'ketidakberesan', maka fungsi dari bagian tubuh yang lain juga akan terganggu. Hal yang sama terjadi pada sebuah tatanan kesatuan dalam masyarakat, dimana individu memiliki fungsi dan peran masing-masing. Jika salah satu fungsi dan peran tidak berjalan dengan baik, maka akan sangat mengganggu kehidupan sebuah masyarakat. Dalam bentuk modern, teori struktural fungsional lebih dititikberatkan pada perubahan sosial. Teori ini berjalan melalui individu dengan peran dan fungsi masing-masing melalui bentuk adaptasi terhadap subsistem struktural fungsionalisme (seperti: pengaruh kebijakan, geografis, budaya, sosial, ekonomi, yang menghasilkan sebuah tindakan (unit aksi). Dari unit aksi inilah kemudian terjadi sistem aksi (act system), dimana masyarakat telah menentukan tujuan dari aksi tersebut. Terbentuklah sebuah tatanan masyarakat dengan keunikannya tersendiri yang nantinya akan mengalami perubahan secara kompleks. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Metode tersebut sesuai dengan jenis penelitian penulis yakni penelitian sejarah, dimana di dalamnya penulis melalui beberapa tahap yakni heuristik, kritik, interpretasi dan terakhir historiografi.

1. Implementasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan di Kawasan Pesisir Pantai Puger 2001-2012

Implementasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan Sebelum Tahun 2001

Kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan Puger di tahun 1978 sangatlah bergantung pada majikan,

namun kondisi masyarakat pada saat itu tergolong normal karena para juragan selalu mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh para nelayan terutama kebutuhan sehari-hari (Mahfudi : 2002). Pada masa modernisasi perikanan, dapat dijumpai strata sosial yang membagi masyarakat nelayan Puger menjadi dua kelompok, yakni kelompok kaya terdiri dari para pengambek, juragan darat dan juragan laut, dan kelompok miskin terdiri dari pandhega dan belantik. Kedua kelompok ini sangat berpengaruh menentukan jalannya modernisasi perikanan di masyarakat. Modernisasi perikanan dapat diartikan sebagai perubahan alat tangkap ikan meliputi perahu, jaring, dan pancing, yang juga memunculkan sistem permodalan melalui pembentukan Koperasi Unit Desa dan Tempat Pelelangan Ikan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Hasil tangkapan ikan dari tahun ke tahun mengalami tren penurunan seperti pada tahun 1990,1991,1992,1997, dan 1998 diakibatkan faktor musim yang tidak menentu dan tangkapan bersifat fluktuatif.

Hasil tangkapan ikan juga mengalami tren peningkatan yang terjadi di periode 1978-1998, disebabkan oleh adanya penggunaan teknologi secara maksimal, dan seringnya nelayan turun ke laut meski dalam keadaan paceklik. Di bidang sosial, munculnya organisasi sosial seperti perkumpulan nelayan dan pembentukan Koperasi Unit Desa membantu mengenalkan nelayan pada kinerja intensif yang diperluas melalui diskusi bersama mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi dilaut biasanya dipecahkan bersama oleh kelompok nelayan (Mahfudi : 2002). Di akhir penerapan modernisasi di tahun 1998, muncul permasalahan-permasalahan di kalangan nelayan diantaranya mengenai kredit peralatan tangkap yang dianggap tidak sesuai dengan biaya perawatan, sehingga nelayan mengeluarkan biaya dua kali lipat. Tidak stabilnya pembagian hasil tangkapan ikan yang didominasi oleh juragan sebesar 50% dari jumlah hasil tangkapan, membuat kesenjangan yang begitu tajam antar nelayan pandhega dengan nelayan juragan, sehingga mengakibatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan Puger dapat mengalami stagnansi.

Implementasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan Tahun 2001-2004

Program pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2001-2004 disusun berdasarkan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai serta kebijakan dan strategi yang dilakukan, yang tetap mengacu pada Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999. Dalam jangka menengah dilaksanakan program pembangunan kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk membantu meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka program pembangunan kelautan dan perikanan dibagi menjadi 5 program yang satu sama lain saling terkait, yaitu: (a) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Masyarakat Pesisir lainnya; (b)

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan sesuai Kemampuan Lestari Sumber Daya Ikan (SDI) dan Daya Dukung Lingkungan; (c) Peningkatan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Kawasan Laut, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Perairan Tawar; (d) Pengembangan Sumberdaya Manusia Aparatur, dan Penguatan Kelembagaan; (e) Penyerasian Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sehubungan dengan otonomi daerah.

Di pesisir pantai Puger, kebijakan pusat diimplementasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember dengan berfokus pada kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir. Implementasi PEMP di pesisir pantai Puger dilakukan dengan beberapa pendekatan agar dapat diterima oleh masyarakat setempat. Pendekatan dapat berupa kegiatan sosialisasi dan penyuluhan program bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, tokoh-tokoh setempat, dan efektifitas dinas terkait. Hal ini perlu dilakukan agar tanggapan pesimis masyarakat tentang program pemerintah, dapat berubah menjadi optimis. Di kawasan pesisir pantai Puger, PEMP dilaksanakan dengan beberapa tahap, dari tahap pengenalan (inisiasi), penerapan (implementasi), dan pengembangan (diversifikasi) melalui pertemuan sebulan sekali di aula kantor kecamatan untuk mengenalkan prosedur penerimaan dana bantuan program melalui pembentukan kelompok-kelompok nelayan.

Implementasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan Tahun 2005-2009

Fokus kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember periode 2005-2009 adalah tetap melanjutkan program pemberdayaan masyarakat pesisir dengan pembaharuan yang disesuaikan dengan perkembangan sosial ekonomi nelayan Puger. Berdasarkan rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember, sasaran dan tujuan yang diterapkan pada periode 2005-2009, adalah (1) mengurangi ketergantungan nelayan pada kreditur informal seperti pengambang, (2) penertiban kelompok-kelompok nelayan yang sudah tidak aktif lagi dalam kegiatan program, yang bertujuan agar nelayan tidak terkecoh dengan adanya pembuatan kelompok nelayan ilegal tanpa persetujuan dari konsultan manajemen dan tenaga pendamping desa, (3) meningkatkan kualitas kelompok-kelompok nelayan yang sudah terbentuk untuk mau memperluas jaringan pada nelayan yang belum terdaftar dalam kelompok (nelayan swadaya). Berdasarkan sasaran dan tujuan tersebut, maka dibentuklah program-program terkait yakni (1) terbentuknya koperasi mina pedesaan, merupakan koperasi nelayan pelaksana kegiatan simpan pinjam dan permodalan untuk membantu pendistribusian bantuan pemerintah pada nelayan, serta berfungsi mempertahankan budaya menabung dikalangan nelayan, (2) dilaksanakannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan program bentukan pemerintah di tahun 2007, berfokus pada pemberian kredit formal bekerjasama dengan bank BRI dan bank Bukopin dengan sasaran untuk meningkatkan kualitas

pranata sosial nelayan yang ada di daerah Puger. Diantaranya sudah terbentuk dalam kelompok-kelompok nelayan serta ditunjang dengan adanya lembaga kreditur formal seperti koperasi mina pedesaan dan lembaga keuangan mikro. Selain itu, program nasional pemberdayaan masyarakat juga berperan dalam meningkatkan kualitas sumberdaya nelayan yakni dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dibawah pengawasan dinas kelautan dan perikanan daerah, (3) penerapan program rumponisasi melalui penggunaan rumpon untuk meningkatkan pendapatan nelayan.

Implementasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2012

Pelaksanaan Program Usaha Mina Pedesaan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2012. Di tingkat daerah, pelaksanaan program usaha mina pedesaan tidak terlepas dari rancangan kerja dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember untuk menseleraskan program PUMP tersebut agar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan Puger. Pelaksanaan program PUMP mencakup dua kegiatan utama yaitu inisiasi (pengenalan) dan implementasi (penerapan). Kegiatan inisiasi dan implementasi yang dilakukan oleh dinas terkait melalui tenaga pendamping desa bertujuan untuk memperkenalkan konsep dasar dan tujuan adanya program PUMP sebagai bagian dari kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir. Selain itu, dalam kegiatan inisiasi nelayan juga diperkenalkan tata cara/prosedur penerimaan dana bantuan PUMP yakni melalui pembentukan dan penguatan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan yang diseleksi berdasarkan kinerja kelompok teraktif dan terbaik.

2. Pengaruh Kebijakan Kelautan dan Perikanan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Puger Kabupaten Jember 2001-2012

Pengaruh Kebijakan Kelautan dan Perikanan 2001-2004

Pada tataran implementatif, program ekonomi pemberdayaan masyarakat pesisir telah diterapkan di pesisir pantai Puger. Hasilnya, berupa pengenalan mengenai pentingnya program PEMP, proses penyaluran dana bantuan PEMP, dan pembentukan kelompok-kelompok nelayan di kalangan masyarakat pesisir yang sudah disosialisasikan dan diterapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Jember. Mengenai kelanjutan dari program ini, yaitu tentang seberapa besar pengaruh yang terjadi akibat diterapkannya program ekonomi pemberdayaan pesisir terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan adalah terletak pada aspek stukturisasi nelayan, pranata sosial, dan pendapatan nelayan. Pengaruh kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir terhadap stukturisasi nelayan adalah (1) timbulnya pembagian kerja berdasarkan peralatan

tangkap, (2) timbulnya anak buah kapal/pandhega kontrak. Banyaknya bantuan peralatan tangkap yang diberikan oleh masing-masing kelompok nelayan menimbulkan kurangnya tenaga pandhega/anak buah kapal yang loyal kepada juragan, karena banyaknya peralatan tangkap yang digunakan juga akan menyerap banyak tenaga kerja, sehingga nelayan pandhega berhak untuk melakukan perpindahan pekerjaan dari kapal satu ke kapal yang lain, (3) perempuan pesisir diberi tempat oleh program PEMP sebagai penyokong dalam kegiatan kelompok-kelompok nelayan, diantaranya sebagai pencatat hasil tangkapan ikan, pengambil ikan di pantai saat suami selesai melaut, dan sebagian mengelola koperasi yang didirikan oleh kelompok nelayan seperti: Koperasi Minaharja, dan Koperasi Minabahari.

Di bidang pranata sosial, pengaruh PEMP terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan diantaranya (1) terbentuknya lembaga permodalan formal yakni terdapat lembaga keuangan mikro (LKM) dan koperasi mina pedesaan seperti koperasi Minaharja dan koperasi Minabahari, yang berfungsi sebagai perantara permodalan antara nelayan dengan pemerintah, dan dimanfaatkan untuk mengembangkan minat nelayan dalam hal menabung sehingga dapat mempersiapkan diri saat musim paceklik tiba, (2) terbentuknya lembaga informal seperti: pengajian, arisan, dan perkumpulan nelayan berfungsi membantu nelayan meningkatkan tali persaudaraan diantara nelayan, (3) terbentuknya kelompok-kelompok nelayan yang berfungsi sebagai tempat menggalang kerjasama untuk meningkatkan kebutuhan sehari-hari dan berpotensi besar menerima bantuan dari pemerintah sehingga dapat digunakan kebermanfaatannya. Pengaruh PEMP terhadap peningkatan pendapatan nelayan yakni bertambahnya pendapatan nelayan dari hasil koperasi dan hasil tangkapan ikan dengan total hasil pendapatan nelayan per bulan adalah Rp 1.377.000. Dapat diambil kesimpulan bahwa adanya program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir turut membantu meningkatkan kinerja dan pendapatan nelayan secara berkelanjutan.

Pengaruh Kebijakan Kelautan dan Perikanan 2005-2009

Pengaruh yang dihasilkan selama regulasi pemberdayaan pesisir berjalan di tahun 2005-2009 yaitu adanya perubahan dan pengembangan tingkat sosial ekonomi di kalangan nelayan mencakup; strukturisasi, pranata sosial, dan tingkat pendapatan nelayan. Beberapa program yang dibentuk seperti penambahan koperasi mina pedesaan dan pengembangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat berpengaruh terhadap strukturisasi, pranata sosial, dan tingkat pendapatan nelayan. Penambahan koperasi mina pedesaan yang diantaranya terdapat Koperasi Minabahari dan Koperasi Minaharja, berpengaruh pada sosial ekonomi masyarakat diantaranya (1) mengubah pandangan sebagian besar masyarakat yang terdaftar dalam koperasi bahwa strata sosial nelayan antara nelayan kaya dan nelayan miskin yang telah terbagi berdasarkan alat penangkapan ikan

tidak terlihat menonjol di lingkungan ini, karena nelayan diperlakukan sama dalam melakukan kegiatan simpan pinjam dan permodalan di koperasi, (2) pranata sosial nelayan dalam bentuk kelompok-kelompok nelayan semakin mengalami penguatan fungsional, (3) tingkat pendapatan nelayan pada masa penambahan koperasi terutama di tahun 2007, dapat dihitung dari besarnya bantuan paket kredit pemerintah yang diberikan pada kelompok-kelompok nelayan, ditambahkan dengan tabungan, dan besarnya hasil tangkapan nelayan per bulan sebesar Rp 1.064.050 per nelayan.

Program nasional pemberdayaan masyarakat berfungsi sebagai sarana meningkatkan kemampuan sumberdaya nelayan dalam menjalankan kegiatan melaut. Pengaruhnya dalam hal strukturisasi nelayan, yakni nelayan dilatih untuk mampu mengenal medan kelautan beserta seisi-isinya, serta dilatih untuk mengerti merawat kapal sehingga strukturisasi dalam nelayan dapat tertutupi dengan peningkatan kemampuan nelayan. Pembagian alat tangkap bukan lagi menjadi penentu harga bayaran nelayan dikapal, tetapi hanya terbatas pada fungsi alatnya saja. Pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan khusus bagi nelayan, membuka wawasan bagi nelayan bahwa kelautan dan perikanan dapat dikembangkan semaksimal mungkin tanpa harus merusak sumberdaya hayati laut. Dalam hal pranata sosial nelayan, program nasional pemberdayaan menempatkan program rumponisasi perikanan sebagai solusi untuk meningkatkan pendapatan kualitas nelayan, sehingga dampak yang dihasilkan adalah terbentuknya konflik diantara nelayan akibat pemasangan rumpon yakni peralatan tangkap ikan modern yang mampu menjangkau ikan sampai kedalaman 2000 meter dengan harga sangat mahal, serta hanya kelompok-kelompok nelayan yang lolos seleksi saja yang mendapatkan bantuan tersebut.

Dari segi tingkat pendapatan nelayan, rumponisasi dapat meningkatkan hasil tangkapan nelayan dan penjualan nelayan karena dibantu oleh koperasi yang ikut menjualkan hasil tangkapan yang dilelang di TPI dan dijual di pasar. Pendapatan nelayan dari tahun 2005 sampai 2008, mengalami peningkatan rata-rata per bulan selama setahun yakni dari sebesar Rp 1.170.000 menjadi Rp 2.539.000, namun pada tahun 2009 mengalami penurunan dapat dilihat hasil pendapatan Rp 2.008.000. Penurunan tersebut disebabkan karena fluktuasi musim yang sedang berlangsung, juga sebagai akibat dari keputusan rumpon yang dilaksanakan pada tahun 2009 karena konflik sosial yang terjadi di kalangan nelayan.

Pengaruh Kebijakan Kelautan dan Perikanan 2010-2012

Di periode ini, kebijakan pemberdayaan pesisir terealisasi dalam program Pembinaan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) yang berpengaruh terhadap strukturisasi nelayan, pranata sosial, dan pendapatan nelayan di pesisir pantai Puger. Pengaruh adanya program PUMP terhadap strukturisasi tersebut yakni : (1) penyediaan dana bantuan bagi setiap jenis kapal yang ada di Puger, dengan persyaratan bantuan harus diterima oleh

kelompok nelayan yang telah diseleksi oleh dinas Kelautan dan Perikanan. Dana tersebut berupa bantuan langsung tunai dan peralatan tangkap ikan seperti *fishing finder* (alat pencari ikan), *trawl*, *grill net*, jaring, dan lain sebagainya, yang sangat berfungsi menyokong kegiatan melaut nelayan sehari-hari, (2) nelayan pandhega sebagai mayoritas nelayan di Puger mulai tergabung dalam dengan kelompok-kelompok nelayan, sehingga tidak terjadi pembedaan pekerjaan antara satu dengan yang lain. Apabila di jaman modernisasi perikanan nelayan pandhega dibedakan upahnya dengan nakhoda, penjaga lampu, dan orang-orang yang ada di kapal, namun saat kebijakan pemberdayaan pesisir, upahnya dibagi sama rata dan hanya berbeda antara ABK dengan nelayan pemilik kapal. Kesimpulannya, strukturisasi nelayan Puger tidak mengalami penghilangan sejak penerapan program PUMP, hanya semakin diperluas hak-hak nelayan sebagai pelaku utama kegiatan melaut.

Program pemberdayaan usaha mina pedesaan yang sasarannya lebih berfokus pada peningkatan hidup nelayan tangkap, pengaruhnya juga terlihat pada pranata sosial nelayan Puger. Pranata sosial yang ada di daerah ini pasca penerapan program PUMP adalah (1) berubahnya kelompok-kelompok nelayan menjadi kelompok usaha bersama, yang artinya terdapat penambahan kegiatan dalam kelompok tersebut, yakni kegiatan simpan pinjam yang juga berfungsi sebagai koperasi. Kelompok-kelompok usaha bersama nelayan yang telah terbentuk, diseleksi oleh TPD bersama KM memastikan bahwa kelompok tersebut memiliki karakter yang baik dan aktif melakukan kegiatan melaut, sehingga setiap bantuan yang datang dari pemerintah, dapat digunakan secara bersama-sama dan tepat guna. Tingkat pendapatan nelayan Puger setelah penerapan program PUMP dapat dihitung berdasarkan laporan produksi ikan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok-kelompok nelayan. Namun hal yang sangat menonjol terlihat pada periode ini adalah (1) anggota-anggota nelayan kelompok mulai membuka koperasi milik kelompoknya untuk penjualan alat-alat penangkapan ikan yang harganya relatif terjangkau, terdapat tiga KUB yang membuka koperasi di Puger diantaranya terdapat KUB Kedung Sumbul Jaya, KUB Mubaroq, dan KUB Menter Jaya.

Dana PUMP yang diberikan sebesar 100 juta perkelompok nelayan, digunakan dalam pendirian usaha tersebut, dan sebagian besar digunakan untuk modal melaut sehingga nelayan tidak lagi bergantung pada pengambek, (2) meningkatnya pendapatan nelayan berkat adanya target produksi yang dimiliki oleh masing-masing anggota kelompok, entah ikan mengalami penurunan ataupun kenaikan akibat fluktuasi musim, nelayan-nelayan ini biasanya selalu menargetkan hasil yang meningkat di tahun berikutnya. Selain itu, tabungan yang nelayan miliki dalam kelompok akan dibagikan setelah terkumpul selama satu tahun, yakni 50% dari hasil tangkapan ikan nelayan yakni sebesar berkisar Rp 6.178.000 sepanjang tahun 2012. Pada tahun tersebut dana bantuan pemerintah terealisasi dalam bentuk bantuan langsung tunai dan peralatan tangkap.

Pendapatan nelayan setiap bulannya mendapat modal dari KUB sebesar 500.000 per orang dengan biaya produksi sebesar 100.000-300.000 rupiah, sisa dari modal tersebut biasanya digunakan sebagai tabungan kelompok. Dapat diambil kesimpulan bahwa program PUMP berpengaruh aktif untuk meningkatkan kehidupan nelayan secara sosial dan ekonomi.

3. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pasca reformasi, kebijakan kelautan dan perikanan dinilai memiliki pengaruh kuat untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan nelayan, sehingga pemerintah menerapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir dengan tujuan mengurangi ketergantungan nelayan pada pemodal informal seperti pengamba' (pengijon), dan memperkenalkan nelayan pada sistem tertib administratif serta permodalan modern agar bisa mengakses informasi mengenai perkembangan sektor kelautan dan perikanan.

Hasilnya, kebijakan kemaritiman yang diimplementasikan di kawasan pesisir pantai Puger terbagi dalam beberapa periode yakni (1) Periode 2001-2004, berisi tentang kebijakan pemberdayaan pesisir berdasarkan ekonomi kerakyatan yang diterapkan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) dan pengaruhnya adalah terbentuknya pranata sosial nelayan dalam bentuk kelompok-kelompok nelayan yang saling bekerjasama, strukturisasi nelayan, terjadinya peningkatan pendapatan nelayan Rp 1.377.000, (2) Periode 2005-2009 dengan tetap berdasar pada kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui program pemberdayaan nasional masyarakat pesisir dan rumponisasi, hasilnya adalah terjadinya penguatan kelompok dikalangan nelayan dan dana perbantuan kredit dapat digunakan secara tepat guna, namun pada tahun 2009 terjadi penghentian program rumpon karena mengakibatkan konflik sosial di kalangan nelayan Puger, (3) Periode 2010-2012, merupakan penerapan kebijakan pemberdayaan melalui PUMP, hasilnya adalah menguatkan peran kelompok nelayan dalam memperluas jaringan dan wawasan kegiatan melaut sehingga dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Berkaitan dengan simpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan ialah:

1. Bagi Pemerintah, agar lebih meningkatkan keefektifan kebijakan kelautan dan perikanan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan.
2. Bagi Lembaga Kelautan dan Perikanan, agar lebih menjaga stabilitas kinerja lembaga agar kebijakan kelautan dan perikanan dapat terlaksana dengan sebaik – baiknya.
3. Bagi Universitas, agar lebih meningkatkan kesadaran akan wawasan bahari, bahwa kelautan dan perikanan sangat penting bagi perekonomian dan masa depan generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

Fauzi A. 2005. *Kebijakan Perikanan dan Kelautan: Isu Strategis dan Gagasan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.

Gottschalk, L. 1986. *Mengerti Sejarah*. Diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.

Juliantara, D. 2004. *Maritim, Partnership, dan Pembaruan*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.

Kusnadi. 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta: AR-RUZZ Media.

Kusnadi. 2007. *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta: LKIS

Margana, S. 2007. "Java Last Frontier: The Struggle for Hegemony of Blambangan c. 1763-1813". Dutch: Leiden Universiteit.

